

Demokrasi Melalui Pilkada Langsung Menuju

Tata Pemerintahan Lokal Yang Baik

Oleh: Lucyane Djafar

Abstract

The implementation of regional autonomy in Indonesia is seen as a strategy that has a dual purpose. First, the granting of regional autonomy is a strategy to respond to the demands of local communities on three main issues, namely the sharing of power, distribution of income, and independence of management systems in the region. Second, regional autonomy is intended as a strategy to strengthen the regional economy in order to strengthen the national economy to the era of free trade

Providing a general election is an instrument for realizing the ideals of democracy. Because it is ironic when the election results gave birth to a political system that is less or not at all democratic. Similarly, results of general elections in 2004 and in 2009 and then should be able to produce the legal system in the field of politics that is the law of regional autonomy that reflects the democratic governance of local and not easily changed according to the desire of power holders.

Keywords: *democracy, local elections, good governance*

Pendahuluan

Sejak awal desentralisasi dan efektifnya penerapan kebijakan otonomi di tahun 2001, bayang-bayang akan ketidakmulusan dan bahkan ketidakberesan di arena politik lokal dihembuskan, termasuk money politics di antara para anggota DPRD yang akan memilih Bupati/Walikota. Kekuasaan DPRD yang terlalu bebas dan besar tersebut membawa sikap arogansi terhadap mereka, sehingga untuk mengatasi kekuasaan tersebut diupayakan sesegera mungkin.

Kedaulatan rakyat yang diberikan kepada anggota DPRD justru disalahgunakan. Kedaulatan rakyat dikebiri menjadi oligarkhi segelintir elite, yang kemudian menentukan

siapa yang akan menjadi Kepala Daerah. Salah satu upaya yang menjadi solusi untuk mengurangi arogansi DPRD adalah dengan mencoba formulasi baru yakni pemilihan kepala daerah secara langsung.

Kenyataan semua yang pernah terjadi menunjukkan bahwa rezim politik di tingkat lokal serta perjuangan politik di DPRD tidak sebanding lurus dengan dan tidak berjalan seiring dengan kepentingan riil rakyat di daerah berikut segala penderitaannya. Hal ini semua merupakan indikasi yang sulit dibantah betapa gelagat dan langgam kekuasaan di arena politik lokal hingga saat ini cenderung bergerak dan bermuara dititik kepentingan elite semata, dan pada